

**TATA KELOLA KAWASAN FOOD ESTATE KABUPATEN WONOSOBO UNTUK
MENDUKUNG LOGISTIK WILAYAH DALAM RANGKA PENYIAPAN WILAYAH
PERTAHANAN DARAT**

**WONOSOBO DISTRICT FOOD ESTATE GOVERNANCE TO SUPPORT REGIONAL LOGISTICS IN
THE FRAMEWORK OF PREPARATION OF LAND DEFENSE AREAS**

Selfira Salsabilla¹, George Royke Deksin², Rizerius Eko Hadisancoko³

PRODI MANAJEMEN PERTAHANAN, FAKULTAS MANAJEMEN PERTAHANAN,
UNIVERSITAS PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA¹²³

selfirasalsabilla20@gmail.com¹, georgeroykedeksino@gmail.com², rizerius87@gmail.com³

Abstrak - Penelitian ini dilatarbelakangi adanya penunjukan Kabupaten Wonosobo sebagai kawasan Food Estate berbasis hortikultura untuk empat komoditas utama yakni bawang putih, bawang merah, cabai dan kentang. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi terkini pengelolaan Food Estate berbasis hortikultura oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo, dan Kodim 0707/Wonosobo serta upaya untuk menyusun tata kelola yang baik dalam pengelolaan Food Estate berbasis hortikultura untuk mendukung cadangan logistik wilayah di Kabupaten Wonosobo dalam rangka penyiapan wilayah pertahanan darat. Guna mencapai tujuan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Tata kelola yang dilakukan saat ini terdiri dari tahap perencanaan, pengorganisasian, aktualisasi dan evaluasi. (2) Upaya mewujudkan tata kelola yang dilakukan saat ini terdiri dari tahap perencanaan, pengorganisasian, aktualisasi dan evaluasi yang diintegrasikan antara kepentingan dan peran pemerintah daerah dan Kodim 0707/Wonosobo sebagai entitas pertahanan dalam sebuah sistem integrasi penyiapan wilayah pertahanan darat yang menyandingkan potensi wilayah yang diarahkan oleh Pemerintah Daerah dengan Potensi pertahanan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Pertahanan Darat. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa dengan penerapan tata kelola yang saat ini pada kawasan Food Estate berbasis hortikultura belum mengakomodir kepentingan pertahanan Negara berupa perwujudan wilayah pertahanan sehingga disusunlah persesuaian dalam matriks isian rencana tata ruang wilayah pada aspek Ruang, Alat dan Kondisi Juang.

Kata Kunci: Food Estate, Hortikultura, Tata Kelola, Logistik Wilayah, Wilayah Pertahanan Darat

Abstract - This research was motivated by the designation of Wonosobo Regency as a horticulture-based Food Estate area for four main commodities namely garlic, shallots, chilies and potatoes. Based on this, this study aims to analyze the current condition of horticulture-based Food Estate management by the Wonosobo District Government, and Kodim 0707/Wonosobo as well as efforts to develop good governance in the management of horticulture-based Food Estate to support regional logistics reserves. in Wonosobo Regency in the context of preparing a land defense area. In order to achieve the goal, this study used a qualitative approach with an analytical descriptive research design. The results of the research show that: (1) The current governance consists of planning, organizing, actualizing and evaluating stages. (2) Efforts to realize governance that are currently being carried out consist of planning, organizing, actualizing and evaluating stages which integrate the interests and roles of the local government and Kodim 0707/Wonosobo as a defense entity in an integrated system for preparing land defense areas that juxtapose the potential of the existing areas. directed by the Regional Government with defense potential in the Land Defense Area

Spatial Plan. The conclusion from this study is that with the current implementation of governance in the horticulture-based Food Estate area and the Wadaslintang Reservoir Green Belt it has not accommodated the interests of national defense in the form of embodiment of the defense area so that adjustments are made in the matrix of the contents of the regional spatial plan on the aspects of Space, Equipment and Combat Conditions.

Keywords: Food Estate, Horticulture, Governance, Regional Logistics, Land Defense Area

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bahwa Sistem Pertahanan Negara bersifat semesta yang terdiri atas 3 komponen yakni komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Komponen Utama terdiri dari tiga matra TNI yang memiliki satu tugas utama yang sama yakni pembinaan wilayah pertahanan. TNI Angkatan Darat dalam membina wilayah pertahanan pada masa damai bertujuan untuk menyiapkan segala komponen yang ada untuk menghadapi kemungkinan terjadinya perang berlarut dalam satu kesatuan pertahanan berdasarkan pasal 8 huruf d Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Perang berlarut adalah salah satu perang yang membutuhkan upaya peningkatan pemberdayaan wilayah pertahanan dengan cara aksentuasi keadaan geografi, demografi, dan kondisi sosial agar menjadi kekuatan pertahanan yang efektif. Disamping itu, perlu adanya pendayagunaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan, dan sarana prasarana lainnya sehingga menjadi kemampuan cadangan dan pendukung guna terwujudnya suatu kekuatan pertahanan negara yang handal. (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015).

Pertahanan untuk tujuan perang berlarut merupakan lapis terakhir dari sistem pertahanan Indonesia, yang menentukan hidup-matinya bangsa Indonesia. Sebagai lapis terakhir, Strategi Perang Berlarut merupakan bentuk Perang Semesta yang melibatkan seluruh bangsa. Indonesia untuk mempertahankan tetap tegaknya NKRI. Strategi tersebut dilaksanakan manakala perlawanan konvensional tidak memberikan hasil. Maka, demi kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, perang berlarut menjadi pilihan dan diselenggarakan secara total, tanpa mengenal menyerah dan berlangsung di seluruh wilayah yang dikuasai oleh lawan. (Yusup, 2014)

Pendayagunaan seluruh Sumber Daya Nasional lainnya yang dipersiapkan secara dini, total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Berdasarkan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara diatur bahwa unsur Sumber Daya Alam dan Buatan merupakan bagian dari Sumber Daya Nasional yang ditransformasikan menjadi logistik wilayah dan cadangan materiil strategis untuk disiapkan menjadi Komponen Pendukung Pertahanan Negara .

Terkait dengan penyiapan cadangan pangan, sumber daya yang ada dioptimalkan melalui pengelolaan sarana prasarana nasional sedemikian rupa agar memiliki fungsi ganda yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan berupa logistik wilayah. Berdasarkan buku Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) Abad 21 (Kementerian Pertahanan, 2021) Logistik wilayah disiapkan bertumpu pada kekayaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan sebagai potensi wilayah yang dapat didayagunakan untuk kepentingan Pertahanan dan Keamanan Negara. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penyiapan logistik wilayah pada dasarnya sama dengan proses penyiapan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung.

Mengingat tidak seluruh pulau-pulau besar memiliki unsur-unsur logistik wilayah dalam jumlah dan jenis yang cukup memadai, maka perlu dilakukan penyiapan logistik wilayah yang secara langsung diarahkan untuk menjamin kemandirian operasi serta efektivitas dan keberlanjutan penyediaan dukungan logistik untuk kepentingan penyelenggaraan perang sesuai eskalasi hingga perang berlarut. Oleh karena itu, Kementerian Pertahanan RI dan TNI bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah, serta Industri Pertahanan melaksanakan penyiapan logistik wilayah secara merata dan terintegrasi di pulau-pulau besar.

Kabupaten Wonosobo selaku bagian dari unsur pemerintah daerah

berperan dalam mendukung penyediaan logistik wilayah sesuai dengan potensi sumber daya alam yang ada berupa kawasan Food Estate berbasis Hortikultura pemilihan jenis tanaman sebagai produk yang dibudidayakan dapat disesuaikan dengan ekologi di sekitar tempat pembudidayaan. Selain ekologi yang sangat mempengaruhi keberhasilan dari pembudidayaan tanaman perkebunan ini ialah faktor keunggulan produk menurut konsumen atau masyarakat sekitar yang terlibat langsung. Sebagaimana kawasan Food Estate berbasis hortikultura yang ada di Kabupaten Wonosobo komoditas utamanya berupa bawang merah, bawang putih, cabai dan kentang seperti pada kawasan Lahan pertanian hortikultura yang tersebar di lima kecamatan, yaitu Kalikajar, Garung, Kejar, Kertek, dan Watumalang, seluas 339 hektare saat ini dicanangkan sebagai kawasan percontohan Food Estate.

Menurut Buku Pintar Food Estate yang diterbitkan Kementerian Pertanian pada tahun 2011, Food Estate merupakan istilah yang populer dari kegiatan budidaya tanaman skala luas atau lebih dari 25 ha yang dilakukan dengan konsep pertanian sebagai sistem insdustrial yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, modal serta organisasi dan manajemen modern.

Konsep dasar Food Estate diletakkan atas dasar keterpaduan sektor dan subsektor dalam suatu sistem agribisnis dengan memanfaatkan sumberdaya secara optimal dan lestari, dikelola secara profesional, di dukung oleh sumberdaya manusia yang

berkualitas, teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan dan kelembagaan yang kokoh. (Kementerian Pertanian, 2011)

Sesuai dengan topografi dan geografi, Kabupaten Wonosobo didukung oleh kontribusi sektor utama yaitu sektor pertanian. Akan tetapi kelembagaan yang bergerak di sektor pertanian ini masih sangat kurang, hal ini tercermin dari masih sedikitnya jumlah koperasi pertanian/ perkebunan /peternakan yang ada di Kabupaten Wonosobo. Dalam kurun waktu 2016 sampai 2020, jumlah koperasi pertanian di Kabupaten Wonosobo menunjukkan penurunan, di mana pada tahun 2016 jumlah koperasi pertanian/ perkebunan/ peternakan sebesar 67 koperasi atau 18,01% dan di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 58 koperasi atau 14,42%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Wonosobo dalam bekerja di sektor pertanian belum semuanya tergabung dalam kelembagaan sehingga tingkat efisiensi maupun efektivitas sektor pertanian masih sangat rendah atau produktivitasnya belum optimal. Untuk itu perlu menginisiasi berdirinya koperasi pertanian atau merevitalisasi kelembagaan yang ada di sektor pertanian untuk ditingkatkan menjadi koperasi pertanian/ perkebunan/ peternakan. (Pemerintah Kabupaten Wonosobo, 2021)

Terkait pengelolaan kawasan Food Estate berbasis hortikultura yang berkaitan dengan sistem pertanian, kajian Lingkungan Hidup Strategis (Pemerintah Kabupaten Wonosobo, 2021)

menyatakan bahwa kerusakan lingkungan ini pada Kabupaten Wonosobo lebih banyak diindikasikan oleh adanya kegiatan pertanian yang tidak memperhatikan kaidah konservasi, proses pertambangan yang tidak memperhatikan keberlanjutan lingkungan sehingga meningkatkan volume limpasan air, serta kegiatan kehutanan (hutan rakyat) yang kurang konservatif. Padahal pada konsep dasar Food Estate ini adalah perkembangan pertanian yang tetap menjaga kelestarian sumberdaya lahan.

Perlu dilakukan penataan dan pembinaan komponen pendukung dilakukan secara terpadu dan terarah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 dan aturan pelaksanaannya dengan prinsip tata kelola yang baik sehingga tujuan penataan dan pembinaan komponen pendukung berupa Food Estate berbasis hortikultura dan sabuk hijau untuk pemenuhan cadangan logistik wilayah dalam rangka penyiapan wilayah pertahanan darat dihadapkan dengan kemungkinan perang berlarut.

Rumusan masalah yang akan di bahas adalah bagaimana kondisi terkini pengelolaan Food Estate berbasis hortikultura untuk mendukung cadangan logistik wilayah di Kabupaten Wonosobo dalam rangka penyiapan wilayah pertahanan darat dan bagaimanakah upaya untuk mewujudkan tata kelola yang baik dalam pengelolaan Food Estate berbasis hortikultura dan Sabuk Hijau Waduk Wadaslintang untuk mendukung cadangan logistik wilayah di Kabupaten

Wonosobo dalam rangka penyiapan wilayah pertahanan darat.

Pada penelitian ini menggunakan teori fungsi manajemen oleh G. R. Terry yang terdiri atas Perencanaan, Pengorganisasian, Aktualisasi dan Pengendalian. Fungsi-fungsi manajemen merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan (Manulang, 2006).

Teori G.R Terry digunakan karena lebih menekankan pada aspek pengorganisasian dan aktualisasi dalam kegiatan manajemen di samping fungsi-fungsi manajemen yang lain. Dalam tata kelola kawasan Food Estate berbasis hortikultura aspek pengorganisasian dan pelaksanaan adalah hal yang sangat menentukan. Tetapi aspek perencanaan dan pengendalian juga menjadi hal yang mendukung dalam aktualisasi.

Fungsi manajemen yang ada digunakan dalam rangka pembinaan logistik dalam doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma termasuk dalam pembinaan kekuatan (Markas Besar TNI, 2010). Logistik wilayah merupakan logistik pertahanan yang bertumpu pada kekayaan sumber daya wilayah termasuk cadangan materiil strategis yang ada di daerah. Hubungan pembinaan logistik wilayah untuk kepentingan ekonomi dengan penyiapan logistik pertahanan. Doktrin Sishankamrata Abad 21 menyatakan bahwa salah satu wujud logistic wilayah adalah menyiapkan satuan TNI yang dapat memproduksi pangan secara berkelanjutan, hal ini dapat dilakukan melalui kemitraan dengan pemerintah daerah salah satunya dalam program Food Estate.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara menyatakan wilayah Pertahanan adalah wilayah yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara. Pengertian penataan Wilayah Pertahanan merupakan penetapan sebuah Wilayah Pertahanan yang didasarkan atas suatu proses perencanaan Wilayah Pertahanan, pemanfaatan Wilayah Pertahanan, dan pengendalian pemanfaatan Wilayah Pertahanan.

Penyiapan wilayah merupakan salah satu persiapan dan pengelolaan sumber daya nasional yang dapat mendukung pertahanan negara. Penyiapan wilayah pada dasarnya diarahkan untuk menyiapkan wilayah agar dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi kepentingan Keamanan dan Pertahanan Negara, khususnya dalam kepentingan damai ataupun kepentingan perang (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015). Pembinaan wilayah pertahanan dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada dan membangun sarana prasarana khusus. Sumber daya yang ada dioptimalkan melalui pengelolaan sarana prasarana nasional sedemikian rupa agar memiliki fungsi ganda yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan.

Wilayah pertahanan darat terdiri dari 4 (empat) kompartementasi atau

bagian yakni daerah pertempuran, daerah komunikasi, daerah belakang, dan daerah pangkal perlawanan. Daerah pertempuran merupakan suatu wilayah yang paling mungkin untuk dilewati musuh atau lawan sebagai jalan pendekat di darat, sehingga wilayah yang dimaksud direncanakan sebagai tempat untuk menghancurkan musuh. Daerah komunikasi adalah daerah yang disiapkan sebagai penghubung antara daerah pertempuran dan daerah belakang guna melancarkan operasi penghancuran musuh. Daerah belakang adalah daerah yang disiapkan sebagai daerah pangkal pertahanan akhir, guna pengembangan kekuatan untuk menghancurkan musuh. Daerah yang keempat adalah daerah pangkal perlawanan yang merupakan suatu daerah yang dipilih dan disiapkan untuk tempat konsolidasi dan penimbunan kekuatan serta logistik. (Markas Besar Angkatan Darat, 2015)

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif melalui pendekatan deskriptif analisis. Metode ini memiliki tujuan utamanya adalah untuk memberikan gambaran dengan menggunakan kata-kata dan angka serta untuk menyajikan profil (persoalan), klasifikasi jenis, atau garis besar tahapan guna menjawab pertanyaan seperti siapa, kapan, dimana, dan bagaimana (Neuman, 2014) dan bukan hanya digunakan untuk mencari jawaban dari pertanyaan 'bagaimana', tetapi juga 'mengapa' dari topik yang diangkat melalui informasi acak yang dijadikan sebagai data, seperti transkrip dan rekaman wawancara, email,

video, gambar, dan catatan. Pendekatan kualitatif juga menyediakan pemaparan komprehensif terkait apa yang menjadi kesenjangan dari *das sein* dan *das sollen* yang timbul pada objek penelitian berdasarkan teori dan data yang diperoleh di lapangan. Untuk memperoleh data yang absah dilakukan uji kredibilitas dengan cara triangulasi data, sumber dan metode.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian terkait Tata Kelola Kawasan Food Estate Berbasis Hortikultura untuk Mendukung Cadangan Logistik Wilayah di Kabupaten Wonosobo dalam Rangka Penyiapan Wilayah Pertahanan Darat ini dilakukan dengan metode pengumpulan data melalui kegiatan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Peneliti melakukan wawancara kepada sejumlah informan dari Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo yang merupakan stakeholder utama dalam program pengelolaan Kawasan Food Estate berbasis Hortikultura. Selain itu, pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung dengan mengunjungi lokasi program yakni di lima kecamatan yang meliputi Kertek, Garung, Watumalang, Kalikajar seluas 339 Ha dengan empat komoditas utama yakni bawang putih, bawang merah, cabai, dan kentang. Sebagai informan pendukung, peneliti melakukan wawancara di Bappeda Kabupaten Wonosobo dan DPUPR Kabupaten Wonosobo. Peneliti juga mengumpulkan dokumentasi pada saat proses wawancara dan observasi berlangsung. Berikut adalah hasil

pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen yang telah dilakukan.

Tata Kelola Kawasan Food Estate Berbasis Hortikultura Di Kabupaten Wonosobo

Tata Kelola Kawasan *Food Estate* Berbasis Hortikultura saat ini telah memenuhi serangkaian proses dalam fungsi manajemen yakni perencanaan, pengorganisasian, aktualisasi dan pengendalian namun pada setiap prosesnya masih menemui kendala. Tahapan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut :

1) Tahap perencanaan adalah suatu keharusan dalam setiap usaha untuk mengembangkan usaha atau mengembangkan lembaga tersebut. Karena perencanaan bersifat vital, seharusnya hal itu dibuat lebih awal. Perencanaan dapat dianggap sebagai suatu kumpulan keputusan-keputusan, dalam hubungan mana perencanaan tersebut dianggap sebagai tindakan untuk mempersiapkan tindakan-tindakan untuk masa yang akan datang dengan jalan membuat keputusan sekarang. (Robbins, 2001)

Pada tahapan terbagi menjadi tiga bagian yakni perencanaan awal, penetapan tujuan dan tahapan perencanaan. Pada perencanaan awal di kawasan *Food Estate* berbasis hortikultura dilakukan ini merupakan tindak lanjut dari penetapan Kabupaten Wonosobo sebagai kawasan pengembangan *Food Estate* berbasis hortikultura oleh Kementerian Pertanian

Ri. Setelah itu Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyusun dan melakukan penetapan lokasi program pada 5 kecamatan yakni Kertek, Kalikajar, Garung, Kejajar dan Watumalang

Penetapan tujuan adalah untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing dan laju pertumbuhan usaha pertanian, dibutuhkan adanya program yang tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha lainnya, tetapi juga menciptakan dampak ganda terhadap sektor dan pelaku ekonomi komoditas terkait yang terintegrasi, horizontal (antara komoditas hortikultura yang prospektin) maupun vertikal (integrasi dari on-farm sampai off farm).

Perencanaan dilakukan dengan tahapan penetapan kelompok tani calon pengelola dan kemudian merumuskan sistem kemitraan yang dibangun dengan offtaker penerima komoditas pasca panen.

2) Tahap pengorganisasian, menurut (Arikunto,2008) pengorganisasian adalah pembagian tugas atau pekerjaan, pembidangan, pengunitan, yaitu: macam dan jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan, banyaknya orang yang terlibat dalam organisasi, dan kemampuan, minat, bakat yang berbeda terhadap pekerjaan

Bahwa saat ini Proses pengorganisasian pada kawasan *Food Estate* berbasis hortikultura, bahwa Pemerintah Kabupaten Wonosobo belum membentuk tim koordinasi khusus yang menangani pengelolaan kawasan ini.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka fungsi pengorganisasian dalam

objek penelitian yakni kawasan Food Estate berbasis hortikultura belum dilaksanakan sepenuhnya dengan belum adanya struktur khusus yang juga memuat tugas dan tanggung jawabnya.

3) Tahap aktualisasi, Menurut (Terry, 2011), *actuating* adalah usaha untuk menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Kegiatan aktualisasi saat ini yang hanya berdasarkan pada sistem kemitraan yang dibangun antara kelompok tani dengan *offtaker* dengan ketentuan yang terdapat pada perjanjian kerjasama.

Operasionalisasi bangsa pasca panen ini belum dapat dilakukan secara optimal karena kurangnya kesadaran anggota kelompok tani terhadap kegiatan *off farm* atau pasca panen. Orientasi anggota kelompok tani saat ini masih fokus pada kegiatan *on farm* dan budidaya komoditas saja.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka aktualisasi saat ini masih sebatas pada kegiatan budidaya pada tingkat kawasan yang belum sepenuhnya berpedoman pada perencanaan yang telah disusun sehingga tujuan belum dapat tercapai.

4) Tahap pengendalian, pada kawasan Food Estate hortikultura saat ini berfokus pada pengendalian dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan pertanian yang kurang konservatif dan penggunaan bahan kimia berlebih serta pengendalian penggunaan alsintan serta saprodi lainnya.

Upaya Dalam Mewujudkan Tata Kelola Yang Baik Pada Kawasan Food Estate Berbasis Hortikultura Untuk Mendukung Logistik Wilayah Di Kabupaten Wonosobo Dalam Rangka Penyiapan Wilayah Pertahanan Darat

Upaya mewujudkan tata kelola yang baik dalam pengelolaan Food Estate berbasis untuk mendukung cadangan logistik wilayah di Kabupaten Wonosobo dalam rangka penyiapan wilayah pertahanan darat dilakukan dengan merumuskan arah kebijakan yang akan datang. Sikap para pelaksana dilakukan sebagai upaya mendorong partisipasi aktif dari kelompok tani pengelola kawasan Food Estate berbasis hortikultura menjadi upaya yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan Kodim 0707/Wonosobo. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik, menciptakan lingkungan eksternal yang kondusif melalui metode Komunikasi Sosial merupakan salah satu upaya dalam mendukung keberhasilan dan kelancaran pengelolaan kawasan Food Estate berbasis hortikultura. Upaya ini menjadi salah satu strategi pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan karena dengan adanya penciptaan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif, para pelaksana program akan dapat menjalankan kegiatannya dengan baik sehingga keberhasilan implementasi kebijakan dapat meningkat dengan menjalankan empat fungsi manajemen yakni perencanaan, pengorganisasian, aktualisasi dan pengendalian untuk dapat mewujudkan ciri-ciri tata kelola yang baik sebagai berikut:

a) Tahap Perencanaan, Pemerintah Kabupaten Wonosobo harus dapat menyelaraskan penyusunan rencana aksi daerah tentang kawasan Food Estate berbasis hortikultura ini dengan rencana program pembinaan teritorial yang dimiliki oleh Kodim 0707/Wonosobo sehingga matriks rencana aksi yang dihasilkan dapat menjadi dasar dalam pelaksanaan pengembangan kawasan Food Estate berbasis hortikultura dengan berorientasi pula pada kepentingan pertahanan Negara dimasa depan berdasarkan kompartementasi wilayah pertahanan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Pertahanan Darat Kodim 0707/Wonosobo.

Pada kaitannya dengan mendukung penyediaan cadangan logistik wilayah dalam rangka penyiapan wilayah pertahanan darat, perencanaan proses pembinaan teritorial didasarkan pada pembagian kompartementasi wilayah pertahanan yakni daerah belakang dan daerah pangkal perlawanan dengan mempertimbangkan potensi wilayah, potensi pertahanan, aspek medan dan alat serta kondisi juang yang ada.

Berikut merupakan sistem integrasi penyiapan wilayah pertahanan darat yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan Kodim 0707/ Wonosobo dengan memanfaatkan potensi wilayah dengan potensi pertahanan yang ada.

Tabel 1 Bagian dan Potensi Wilayah dan Potensi Pertahanan Kawasan Food Estate Berbasis Hortikultura Kecamatan Garung dan Watumalang

POTENSI WILAYAH (PEMKAB WONOSOBO)	POTENSI PERTAHANAN (DAERAH BELAKANG)	KETENTUAN
sebagai daerah pertanian berbasis korporasi dengan komoditas utama bawang putih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalasi Bantuan Administrasi 2. Jalan Pendekat 3. Daerah Latihan Logistik Wilayah 	Didaerah ini dirancang untuk dapat berswadaya dan berswasembada dalam keadaan damai maupun perang, menjadi daerah yang disiapkan untuk mendukung logistik wilayah

Sumber : diolah peneliti, 2022

Tabel 2 Bagian dan Potensi Wilayah dan Potensi Pertahanan Kawasan Food Estate Berbasis Hortikultura Kecamatan Kertek, Kalikajar, dan Kejajar

POTENSI WILAYAH (PEMKAB WONOSOBO)	POTENSI PERTAHANAN (DAERAH PANGKAL PERLAWANAN)	KETENTUAN
Sebagai daerah pertanian berbasis korporasi dengan komoditas utama bawang putih, cabai dan kentang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah 2. Jalan Pendekat 3. Logistik 	Didaerah ini dirancang untuk menjadi tumpuan dilancarkannya operasi perlawanan wilayah dengan operasi gerilya dan daerah ini dikembangkan daerah pertanian dan dibangun sarana prasarana fisik yang berkaitan dengan pembinaan masyarakat

Sumber : diolah peneliti, 2022

- b) Tahap Pengorganisasian, pembentukan tim koordinasi khusus akan memudahkan pengelolaan dan pengendalian kawasan baik pada lokasi Food Estate hortikultura. Dengan adanya pembentukan tim koordinasi khusus ini tugas dan fungsi masing-masing dinas teknis bisa dimaksimalkan dalam pengembangan kawasan.
- c) Tahap Aktualisasi, Aktualisasi dalam pengelolaan kawasan Food Estate berbasis hortikultura dapat dilakukan dengan serangkaian aktifitas sebagai roadmap yang akan menghasilkan outcome Terbangunnya sentra produksi pangan terpadu, modern dan berkelanjutan untuk penguatan ketahanan pangan dan gizi serta peningkatan kesejahteraan petani. Pada kaitannya dengan peminana territorial dilakukan dengan metode Komunikasi Sosial, Perlawanan Wilayah dan Bakti TNI.
- d) Tahap Pengendalian, kegiatan ini memerlukan batasan-batasan yang pasti yang mengatur tindakan para pengendali terhadap aktifitas yang dilakukan. Untuk itu harus adanya MoU pada pengelolaan kawasan Food Estate Berbasis Hortikultura sehingga terdapat klausul mengatur di dalamnya sebagai alat kendali. Terkait dengan pengendalian pembinaan territorial yang dilaksanakan salah satunya dengan Evaluasi Kajian Organisasi dan Tugas dan Evaluasi Kemantapan

Kesiapan Operasional belum dapat terealisasi dengan sepenuhnya karena substansi atau materi yang termuat dalam kajian organisasi dan satuan cenderung belum dituangkan secara jelas dan sebenar-benarnya.

KESIMPULAN, REKOMENDASI DAN PEMBATASAN

Tata kelola kawasan Food Estate berbasis hortikultura saat ini telah memenuhi unsur fungsi manajemen namun belum dapat menghasilkan grand design pengelolaan yang dapat dijadikan acuan dalam aktualisasi dan pengendalian. Upaya mewujudkan tata kelola yang baik untuk pemenuhan logistik wilayah dalam rangka penyiapan wilayah pertahanan darat dilakukan dengan menyusun penyelarasan potensi wilayah dengan potensi pertahanan sesuai dengan kompartementasinya. Berdasarkan kesimpulan diatas, maka rekomendasinya sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo diharapkan dapat menyusun dokumen perencanaan khusus mengenai tata kelola Food Estate berbasis hortikultura agar potensi yang ada bisa terus dikembangkan untuk meningkatkan ketersediaan pangan dan kesejahteraan petani.
2. Bagi Kodim 0707/Wonosobo dapat menyusun dan melakukan revisi pada dokumen rencana tata ruang wilayah dan produk turunannya sesuai dengan perkembangan yang ada sehingga dapat benar-benar menghasilkan pedoman yang jelas dan terarah sesuai

dengan orientasi pembangunan daerah untuk mendukung penyiapan wilayah pertahanan darat.

Pembatasan pada penelitian ini adalah pemanfaatan potensi alam yang tidak berorientasi pada kelestarian dan keberlangsungan sumber daya serta kurangnya pengorganisasian SDM pengelola kawasan Food Estate berbasis hortikultura dan upaya mewujudkan tata kelola sesuai dengan teori fungsi manajemen, dalam pengelolaan Food Estate berbasis hortikultura untuk mendukung cadangan logistik wilayah di Kabupaten Wonosobo dalam rangka penyiapan wilayah pertahanan darat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2008). *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2021). *Dokumen Sishankamrata Abad 2021*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2011). *Buku Pintar Food Estate*. Jakarta : Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Markas Besar TNI. (2010). *Doktrin Tentara Nasional Indonesia Tridarma Ekakarma (Tridek)*. Jakarta: Staf Umum TNI.
- Markas Besar Angkatan Darat. (2015). *Petunjuk Teknis tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Pertahanan Darat*. Jakarta : Pusat Teritorial Angkatan Darat.
- Neuman, W. Laurence (2015). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. Jakarta: PT Indeks.
- Pemerintah Kabupaten Wonosobo. (2021). *Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah*. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2014 Tentang *Penataan Wilayah Pertahanan Negara*.
- Terry, George R. & Leslie W. Rue. (2011). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Robbins, Stephen P. (2001). *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi*, Jilid 1, Edisi 8. Jakarta : Prenhallindo.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 *Tentang Pertahanan Negara*.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 *Tentang Tentara Nasional Indonesia*.
- Yusup. (2014) *Optimalisasi Pertahanan Negara Guna Mengantisipasi Dampak Konflik Laut Cina Selatan Dalam Rangka Keutuhan NKRI*. Kertas Karya Perorangan (Taskap) Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LI Lembaga Ketahanan Nasional RI..